

Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Gresik (1970-1994)

Ekha Mar'atus Sholikhah¹⁾
Muryadi²⁾

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang pencemaran lingkungan di Kabupaten Gresik tahun 1970-1994. Pertumbuhan pesat industri sejak tahun 1970-an menyebabkan terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah di Kabupaten Gresik. Berbagai jenis pencemaran tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Atas kondisi demikian, muncul respon yang berbeda-beda dari masyarakat. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sikap industri terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan seringkali tidak membuahkan hasil yang optimal. Terlebih lagi pengelolaan lingkungan hidup secara terstruktur di Kabupaten Gresik baru dilakukan tahun 1994. Hal ini ditandai dengan pembentukan bagian lingkungan hidup. Akibatnya masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi.

Kata Kunci: Gresik, Industrialisasi, Pencemaran

Abstract

This paper is reviewing about environmental pollution in Gresik Regency in 1970-1994. The rapid industry development since 1970th has been causing air, water and land pollution in Gresik Regency. Various kinds of the pollution inflicted negative effect for people in terms of social, economy, health and psychology. Based on the condition, different responses appear from the people. This matter mainly effected by industry attitude towards the local people. Whereas, the overcoming effort done by government and company often delivered nonoptimal result. Moreover environmental living management structurally in Gresik Regency is done recently in 1994. This matter is marked by establishment of living environmental part. As the result people always become the disadvantaged side for the occurred pollution.

Keywords: Gresik, industrialization, pollution

Pendahuluan

Industrialisasi menimbulkan dua dampak yang berlainan bagi kehidupan manusia. Pada satu sisi kehadiran industri dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Namun, pada sisi lain aktifitasnya menjadi

sumber terbesar pencemaran lingkungan. Sebagai salah satu kota industri, Gresik menghadapi permasalahan tersebut. Meskipun demikian, pada awal industrialiasi tahun 1950-an permasalahan polusi di Gresik belum kompleks. Ketika itu alam masih

1) Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, NIM 121211433027, email ekha_ms@ymail.com, alamat Desa Palebon, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik.

2) Dosen Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga. NIP: 196402181994031002, email: masmuryadi@yahoo.com.

dapat menetralkan bahan buangan industri semen. Semburan debu dan suara bising hanya dirasakan oleh masyarakat perumahan Semen Gresik dan sekitarnya. Kondisi demikian tidak memunculkan aksi protes dari masyarakat sekitar yang mayoritas berstatus sebagai karyawan (Wawancara Adiana Setiawati, 2015). Memasuki tahun 1970-an pencemaran di Gresik mulai meluas sebagai akibat tingginya aktifitas industri. Sejak saat itu aspek kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis masyarakat terganggu. Tulisan ini akan mengulas terjadinya pencemaran tersebut, respon masyarakat yang menyertainya, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi pencemaran di Kabupaten Gresik.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam hal ini, sumber-sumber yang digunakan adalah dokumentasi arsip, surat kabar, buku, jurnal, karya ilmiah, hingga sumber lisan. Peneliti mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh berbagai sumber tersebut, misalnya Kantor Pusat Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur, Kantor Pusat Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gresik, Kantor Pusat Arsip Kota Surabaya, Perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Stikosa, dan pemukiman sekitar industri yang terkena polusi. Berbagai sumber tersebut melalui tahap verifikasi untuk melihat sisi autentisitas dan kredibilitasnya. Kemudian, peneliti menafsirkan dan mencari keterkaitan antar sumber. Pada tahap terakhir peneliti merangkai berbagai fakta dari sumber yang telah dikritik dan ditafsirkan menjadi kisah sejarah.

Pembahasan

Industrialisasi di Kabupaten Gresik

Pada dasarnya industrialisasi di Kabupaten Gresik didasari atas kondisi geografis wilayah. Daerah Gresik

merupakan hamparan dataran pegunungan yang berada di dekat pantai (Loemaksono, 2012: 17). Gresik dikelilingi oleh pegunungan kapur dari Timur ke Barat sampai Tuban (*Surabaya Post*, 6 Oktober 1990). Hampir setengah bagian dari wilayah Gresik merupakan daerah pesisir pantai (Statistik Kabupaten Gresik, 1985: 1). Sebagian besar wilayah Gresik dataran rendah dengan tanah yang gersang, tandus, dan kurang subur (Tim Penerangan Daerah Militer VIII/Brawijaya, 1976: 45). Kondisi geografis demikian tidak membawa peruntungan dalam bidang agraris. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Gresik bermata pencaharian sebagai pengrajin dan pedagang (Oemar Zainuddin, 2010: 9).

Kondisi alam yang tidak menguntungkan dalam sektor pertanian justru mendukung pertumbuhan sektor industri. Kekayaan alam berupa bukit kapur menjadi faktor utama pendirian industri semen sekitar tahun 1950-an (Bisuk Siahaan, 1996: 197). Industrialisasi di Kabupaten Gresik sempat *vacum* hingga berdirinya PT Petrokimia Gresik pada tahun 1970-an. Pendirian industri tersebut diikuti dengan berdirinya industri-industri lain, seperti: PT Nippon Paint, PT United Trans Ocean Marine Paint Co, PT Wihatta Karya Agung, PT Chandra Dirgantara, PT Nusantara Plywood, PT Barata Indonesia, PT Eternit, PT Surya Kertas, PT Surabaya Mekabox, dan sebagainya. Perluasan Gresik sebagai kota industri tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: harga tanah murah dibanding Sidoarjo dan Surabaya, letaknya strategis karena dekat Surabaya, dan dekat dengan pesisir sehingga memperlancar arus pengiriman barang (*Surabaya Post*, 31 Januari 1979).

Pada tahun 1980-an pertumbuhan industri di Gresik semakin meningkat. Saat itu Gresik ditetapkan sebagai zona industri kimia dasar (*Buletin Berita industri*, No. 4 th. XV 1981). Pada periode tersebut PT Petrokimia Gresik gencar

melakukan pembangunan. Pabrik-pabrik baru dan anak-anak perusahaan didirikan dalam rentan waktu yang berdekatan, seperti: PT Petrokimia Kayaku, PT Petrosida, pabrik ZA, pabrik asam sulfat, pabrik cement retarder, dan sebagainya (*Buletin Berita Industri*, No. 12 th XVI 1983/1984). Disamping itu, industri-industri berskala besar lainnya juga mulai dibangun, seperti: PT Indospring, PT Intan Ustrik, PT Liku Telaga, dan sebagainya. Atas perkembangan industri tersebut kawasan pengembangan industri yang awalnya meliputi tiga wilayah (Kebomas, Gresik, dan Driyorejo) bertambah satu wilayah yakni Manyar (*Surabaya Pos*, 27 Februari 1982).

Pada akhir tahun 1980 dapat dikatakan lahan industri di Gresik telah mencapai batas maksimum. Meskipun demikian, pembangunan industri masih tetap dilanjutkan (*Jawa Pos*, 2 Februari 1989). Pada tahun 1990-an industri-industri baru bermunculan di Gresik, seperti: PT Smeelting, PT Petro Jaya Boral Plasterboard, kawasan industri Maspion, kawasan industri Gresik, dan sebagainya. Kondisi demikian didukung dengan pembangunan fasilitas pendukung industrialisasi pada tahun 1990-an yakni PLTGU Gresik dan jalan tol Surabaya Gresik (Purnawan Basundoro, 2001: 137). Oleh karena itu, Kota Gresik dikelilingi oleh industri. Begitu pula dengan kondisi di Driyorejo yang telah dipadati berbagai jenis industri.

Pertumbuhan industri yang semakin meningkat membuat pencemaran lingkungan semakin kompleks. Terlebih lagi sebagian besar industri belum memiliki alat pengolah limbah atau pengendalian polusi yang memadai. Sebagian besar industri tersebut baru melengkapi alat-alat pengontrol polusi setelah muncul permasalahan dengan masyarakat sekitar.

Pencemaran Lingkungan Akibat Industrialisasi

Industrialisasi memiliki peran besar dalam terjadinya pencemaran lingkungan

di Kabupaten Gresik. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan terjadi, mulai dari pencemaran udara, ekosistem perairan, hingga tanah. Berikut ini uraian secara kronologis terjadinya berbagai bentuk pencemaran lingkungan di Kabupaten Gresik.

Pertama, pencemaran udara di Gresik mulai dirasakan kompleks sejak tahun 1970-an. Beragam jenis polusi dari berbagai industri telah bercampur dengan udara Gresik, seperti: debu, SO_2 , NH_3 , CO , serbuk kayu, dan sebagainya. Beberapa industri yang ditengarai menjadi penyumbang besar atas pencemaran udara di Kabupaten Gresik adalah PT Semen Gresik, PT Petrokimia Gresik, PT Nusantara Plywood, PT Intan Prima, PT Intan Ustrik, PT Miwon, PT Emdeki, dan sebagainya. Industri-industri tersebut menjadi sorotan masyarakat atas limbah gas yang dihasilkannya.

Pada tahun 1980-an pencemaran udara di Gresik tergolong rawan di Jawa Timur. Hal ini disebabkan kadar zat berbahaya di udara Gresik semakin tinggi (*Surabaya Post*, 18 November 1986). Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghentikan arus industrialisasi. Beberapa industri berpolutan tinggi justru dibangun di Gresik tahun 1990-an, seperti: pabrik aspal dan pabrik baja. Bahkan, tindakan pemerintah untuk memindahkan pabrik aspal dari Wonokromo ke Gresik untuk menghindari pencemaran dinilai tidak tepat oleh ahli lingkungan. Menurut tingkat pencemaran udara di Gresik justru lebih tinggi dibandingkan di Wonokromo (*Surabaya Post*, 9 Mei 1992). Ketika itu secara kasat mata udara Gresik terlihat sangat kotor. Warga juga merasakan bahwa pencemaran dilokasinya semakin serius mulai dari bau busuk hingga debu yang membuat sesak napas (*Surya*, 7 Februari 1994).

Kompleksnya pencemaran udara berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat Gresik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sejak tahun 1980-an hingga 1990-an jumlah

penderita asma meningkat dari sekitar 50 - 55 ribu jiwa menjadi 60 - 65 ribu jiwa. Jumlah penderita tersebut paling banyak ditemukan di Kebomas (*Surabaya Post*, 26 April 1993). Meskipun demikian, belum ada penelitian secara pasti yang menunjukkan pengaruh polusi terhadap ISPA (*Surabaya Post*, 29 April 1993). Terlepas dari semua itu masyarakat merasakan bahwa limbah gas yang disebarkan oleh industri menyebabkan mata perih hingga sesak napas. Kondisi demikian membuat masyarakat malas keluar rumah sehingga intensitas hubungan antar sesama semakin menurun.

Sedangkan, kesalahan pada unit produksi justru menambah keresahan warga karena pencemaran yang dirasakan semakin parah. Tragedi kebocoran yang paling menegangkan terjadi pada PT Petrokimia Gresik pada akhir tahun 1993. Akibat kebocoran tersebut warga mengalami gangguan saluran pernapasan hingga pingsan. Perusahaan telah menanggung semua kerugian dan biaya rumah sakit korban. Namun, rasa trauma atas kejadian tersebut tetap membayangi psikologis masyarakat (Wawancara Slamet Uman, 2015).

Sementara itu, sektor perekonomian masyarakat yang menurun akibat polusi udara adalah budi daya sarang burung walet. Sejak tahun 1970-an penghasilan petani walet terus menurun (*Surabaya Post*, 30 Juli 1984). Lambat laun budidaya walet tidak lagi menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi para pengusahanya. Dengan demikian, pencemaran udara menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, baik dari segi sosial, kesehatan, ekonomi, dan psikologis.

Permasalahan polusi udara seringkali menjadi perdebatan diantara pihak-pihak terkait. Industri, pemerintah, ahli lingkungan, dan masyarakat memiliki persepsi berbeda tentang penetapan kondisi tercemar. Hal ini disebabkan tidak adanya pemantauan secara periodik mengenai kondisi udara telah tercemar

oleh pemerintah. Padahal sejak tahun 1988 telah ditetapkan Keputusan Gubernur No. 188 tentang Baku Mutu Udara di Jawa Timur. Atas kondisi demikian, setiap industri mengklaim bahwa pencemarannya masih dibawah ambang batas yang ditentukan. Penanganan masalah pencemaran udara baru dilakukan secara intensif sejak ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Kedua, pencemaran ekosistem perairan. Daerah sepanjang pesisir pantai dan sungai merupakan kawasan yang menjadi sasaran pembangunan industri. Oleh karena itu, kedua kawasan tersebut tercemar karena menjadi tempat pembuangan limbah industri. Perubahan secara drastis pada pesisir pantai terlihat sejak kehadiran industri kimia tahun 1970-an (Wawancara Sun'an, 2015). Kondisi demikian dirasakan oleh masyarakat pesisir yakni warga Desa Tepen, Pojok Pesisir, dan Lumpur. Indikasi pencemaran dilihat dari keruhnya perairan pesisir dan matinya ikan secara mendadak. Hal ini selaras dengan data yang diungkap oleh Dinas Perikanan Jawa Timur bahwa selama kurun waktu 1976 sampai dengan 1986 terjadi perubahan komposisi dan jumlah ikan yang tertangkap di perairan pantai Gresik. Kemudian, penelitian tahun 1988 membuktikan bahwa wilayah pantai Gresik telah tercemar (*Surabaya Post*, 25 Mei 1989).

Pencemaran pada pesisir pantai berdampak negatif bagi beberapa kalangan, seperti: nelayan, petani tambak, dan petani garam. Menyingkirnya ikan dan kerang dari pesisir menyulitkan nelayan untuk mencari ikan. Sedangkan, air laut yang tercemar membuat kualitas garam yang dihasilkan menurun. Begitu pula dengan kondisi tambak yang tercemar oleh air laut. Oleh karena itu, mata pencaharian ketiga kelompok

masyarakat tersebut mengalami penurunan. Atas polusi tersebut masyarakat menuding industri kimia sebagai biang pencemar. Namun, tidak pernah dilakukan penelitian yang mengungkap secara pasti akan hal tersebut (*Surabaya Post*, 21 September 1994).

Sementara itu, seiring dengan tumbuhnya industri-industri di aliran sungai telah mempengaruhi kehidupan biotanya. Kawasan industri Gresik yang seringkali tersandung masalah pencemaran adalah Driyorejo. Sepanjang sungai di wilayah tersebut baik Kali Surabaya maupun Kali Tengah menjadi sasaran pembuangan limbah industri. Pencemaran Kali Surabaya oleh beberapa industri di Driyorejo telah terjadi tahun 1975 (AKS, 1975). Sejak saat itu pencemaran Kali Surabaya menjadi tradisi musim kemarau. Indikasi atas terjadinya pencemaran pada sungai tersebut adalah warna air yang keruh hingga matinya beberapa ekor ikan secara massal (*Surabaya Post*, 22 September 1976).

Memasuki tahun 1980-an pencemaran Kali Surabaya terjadi sepanjang tahun baik musim kemarau ataupun penghujan. Kadar BOD dan COD Kali Surabaya sangat tinggi terutama pada musim hujan (*Surabaya Post*, 13 Desember 1986). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi Kali Tengah yang mulai tercemar akibat industrialisasi di kawasan tersebut (Wawancara Samirin, 2016). Bahkan, pencemaran pada era tersebut sempat menghentikan produksi PDAM Surabaya di tahun 1982 (*Surabaya Post*, 31 Agustus 1987).

Pada tahun 1990-an pencemaran industri oleh limbah industri di Driyorejo terus terjadi. Kondisi Kali Tengah yang bermuara ke Kali Surabaya semakin memprihatinkan. Air sungai tersebut tampak berwarna coklat kehitaman dengan busa berwarna krem dan pingir sungai bergelembung (*Neraca*, 13 Agustus 1994). Oleh karena itu, masalah pencemaran Kali Surabaya masih terus terjadi. Hingga tahun 1990-an tersebut

beberapa industri di Driyorejo yang seringkali menjadi sorotan atas pencemaran tersebut adalah PT Miwon, PT Surabaya Wire, PT Surya Kertas, PT Surabaya Mekabox, PT Huey Chi, dan sebagainya. Beberapa industri tersebut baru memiliki *water treatment* pada pertengahan tahun 1980. Namun, hingga tahun 1990-an unit pengolah limbah tersebut belum sempurna ataupun tidak dioperasikan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan oleh kalangan industri untuk menghemat biaya produksi.

Sementara itu, pencemaran yang terus terjadi membuat biaya produksi pengolahan air PDAM meningkat. Atas kondisi demikian, kenaikan tarif tidak dapat dihindari (*Surabaya Post*, 21 April 1987). Disamping itu, pencemaran tersebut juga membahayakan kesehatan masyarakat. Kondisi Driyorejo sebagai daerah yang sulit air membuat wabah penyakit mudah menyerang masyarakat (*Surabaya Post*, 30 Januari 1984).

Ketiga, pencemaran tanah dapat dilihat melalui sisi produktifitas tanah dan kualitas air sumur. Pencemaran tanah terutama terjadi pada kawasan industri yang cukup jauh dari pesisir. Meskipun demikian, pencemaran tanah yang seringkali terjadi di Gresik adalah penurunan kualitas air sumur. Sedangkan, untuk sisi penurunan produktifitas tanah hanya terjadi di kawasan Manyar. Kondisi demikian terjadi tahun 1990-an pada sawah Desa Sukomulyo karena tercemar limbah pabrik belerang dan tawas. Akibatnya tanaman padi masyarakat tidak dapat berbuah (*Surabaya Post*, 19 Januari 1993). Disamping itu, tanah milik PT Intan Ustrik yang memproduksi sejak tahun 1980-an menjadi buangan limbah tinta dengan kadar BOD dan COD tinggi. Namun, pencemaran itu tidak meresahkan masyarakat karena tanah tersebut hak milik perusahaan (*Surabaya Post*, 16 September 1987).

Sementara itu, pencemaran tanah melalui penurunan kualitas air sumur terjadi di Desa Indro dan Driyorejo. Pada

tahun 1980-an masyarakat Indro merasa terganggu karena air sumurnya menimbulkan gatal-gatal akibat buangan limbah pabrik esbes. Namun, pencemaran tersebut dengan segera diatasi oleh perusahaan. Setelah kejadian tersebut air sumur penduduk tetap tidak dapat digunakan untuk minum. Sebab kondisi air sumur masih keruh hanya saja tidak mengandung kapur (Wawancara Parmanto, 2015). Sedangkan, pencemaran sungai kompleks yang terjadi di Driyorejo membuat hampir semua wilayah tersebut terkena pencemaran sumur sejak tahun 1990-an. Hal ini terkait dengan pembuangan limbah industri di sepanjang Kali Tengah yang sudah parah sehingga merembes ke sumur penduduk. Ketika itu air sumur mulai berubah menjadi coklat kehitam-hitaman terutama jika diendapkan selama satu malam. Kondisi demikian membuat air sumur tidak layak konsumsi. (Surya, 15 Agustus 1994).

Respon Masyarakat Gresik Atas Pencemaran Lingkungan

Pencemaran yang terjadi di Kabupaten Gresik memunculkan respon yang berbeda-beda dari masyarakat. Pola respon tersebut dipengaruhi oleh posisi masyarakat, tingkat pendidikan, sikap industri, karakter masyarakat, dan situasi politik pada waktu itu. Dalam hal ini, sikap industri memiliki andil besar dalam mengontrol respon yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat disekitar industri yang berdiri tahun 1970-an memiliki keberanian lebih untuk mengungkapkan protes. Hal ini disebabkan beberapa industri yang berdiri pada era tersebut berada ditengah pemukiman masyarakat. Respon yang ditunjukkan oleh masyarakat melalui beberapa tahapan. Pada awalnya aksi protes tersebut bersifat diplomasi, misalnya kunjungan tokoh masyarakat ke perusahaan hingga mengirimkan surat ke perusahaan. Jika cara diplomasi tidak membuahkan hasil maka masyarakat menunjukkan reaksi keras.

Industri-industri berskala besar

yang berpotensi besar dalam mencemari lingkungan menunjukkan sikap yang berbeda dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Dua industri besar yang berstatus BUMN yakni industri semen dan kimia memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat. Secara rutin industri tersebut memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, industri tersebut tidak menerima reaksi keras dari masyarakat. Bahkan, pelaksanaan *bedhol desa* yang berpotensi konflik tidak menimbulkan unjuk rasa. Kondisi demikian didukung oleh situasi pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Pengamanan dari Kodim dan Koramil yang sangat ketat membuat masyarakat takut untuk memberontak (Wawancara Nur Fitri, 2015).

Sedangkan, satu-satunya kelompok masyarakat yang tidak pernah mengajukan protes walaupun tidak mendapatkan kompensasi adalah masyarakat kawasan kota lama disekitar alun-alun. Masyarakat dikawasan tersebut tidak memiliki keinginan untuk memberontak. Padahal budi daya walet mereka menurun akibat polusi. Masyarakat tersebut memiliki keyakinan bahwa rezeki berasal dari tuhan (Wawancara Oemar, 2016). Bahkan, para pemilik sarang burung walet juga ada yang berkeyakinan bahwa menurunnya penghasilan sarang walet karena pemiliknya kurang beramal (Surabaya Post, 17 April 1988).

Sementara itu, industri-industri besar lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan cenderung menutup hubungan dengan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi penyebab utama masyarakat disekitarnya menyatakan reaksi keras. Masyarakat yang menjadi pioner aksi unjuk rasa adalah masyarakat Desa Indro. Setiap protes yang dilakukan oleh masyarakat Gresik sebelah Selatan lainnya selalu dikoordinasi oleh panitia dari Desa Indro (Wawancara Pauwan, 2015). Industri yang menjadi sasaran reaksi keras masyarakat Indro adalah PT

Nusantara Plywood sekitar tahun 1987 (*Surabaya Post*, 8 Juli 1987). Masyarakat merasakan bahwa industri tersebut menjadi penyumbang terbesar pencemaran disekitarnya.

Penggerak utama aksi unjuk rasa tersebut adalah Parmanto. Beliau dipilih masyarakat sebagai ketua panitia 7 yang mengkoordinasi aksi unjuk rasa. Atas aksinya tersebut, beliau sempat merasakan kerasnya rezim Orde Baru dalam menindak para provokator (Wawancara Parmanto, 2015). Sedangkan, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut pihak aparat desa cenderung menghalangi masyarakat. Ketika itu aparat desa telah diamankan oleh Kodim dan Koramil. Mereka diancam dan disebut-sebut sebagai PKI jika terlibat dalam protes tersebut. Disamping itu, kelurahan juga mendapatkan kompensasi 100 rb/bulan dari perusahaan (*Surabaya Post*, 8 Juli 1987).

Aksi warga Indro ini tidak terputus dengan adanya kompensasi. Perusahaan yang menawarkan kompensasi besar ditolak oleh pihak panitia. Namun, kasus ini berakhir setelah dipindah tangankan ke DPRD. Niat mendapat keadilan dengan mengadu ke DPRD justru tetap tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, panitia mengindikasikan bahwa DPRD telah kongkalikong dengan perusahaan. Tidak adanya kejelasan kasus tersebut memunculkan kesalah pahaman diantara pihak terkait. Masyarakat yang ikut melaksanakan demo menduga bahwa panitia telah disuap oleh perusahaan. Kepercayaan warga Indro, Singosari, Krangkiring, dan sekitarnya hilang terhadap panitia tersebut (Wawancara Parmanto, 2016).

Selanjutnya, pada tahun 1990-an masyarakat Gresik semakin rektif dalam mengajukan aspirasinya. Hal ini dipengaruhi oleh kompleksnya pencemaran yang terjadi. Disamping itu, pembicaraan mengenai lingkungan hidup di media massa semakin populer (Hadi Wuryan, 1997: 71-76). Ketika itu

masyarakat tidak canggung lagi untuk mendatangi industri, mengadakan unjuk rasa, bahkan membawa kasus ke ranah hukum atas pencemaran lingkungan. Beberapa industri yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa masyarakat pada era tersebut adalah PT Liku Telaga, PT Emdeki Utama, PT Timur Mega Steel, PT Sinar Berlian, PT Intan Prima, dan sebagainya.

Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Atas kondisi demikian, telah dilakukan beberapa upaya untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan di Kabupaten Gresik. Pihak yang memiliki andil besar dalam upaya penanggulangan ini adalah pemerintah dan perusahaan sebagai penentu dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik diantara keduanya untuk menuntaskan masalah lingkungan. Namun, upaya penanggulangan yang dilakukan menemui berbagai kendala. Beberapa langkah yang ditempuh tidak efektif dalam mengatasi pencemaran. Berikut ini beberapa upaya penanggulangan pencemaran di Kabupaten Gresik.

Pertama, penghijauan di kawasan industri. Pelaksanaan penghijauan di Kota Gresik mulai mendapat perhatian sejak awal tahun 1980-an masa kepemimpinan Bupati Wasiadji, SH. Pada era tersebut Pemda Gresik mulai bekerja sama dengan dinas-dinas dan pabrik-pabrik dalam mensukseskan program penghijauan. (*Surabaya Post*, 25 Juli 1981). Program tersebut terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Bupati Amiseno tahun 1986. Ketika itu pemandangan di beberapa sudut kota mulai tertata cantik dengan keberadaan jalur hijau dan taman. Namun, keberadaan ruang hijau tersebut diiringi dengan pemandangan polusi udara

yang membumbung tinggi di udara (*Surabaya Post*, 16 Juli 1987). Kemudian, penataan penghijauan kota secara terstruktur baru dilakukan tahun 1991 dengan pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas yang dibentuk tanggal 9 Oktober 1991 itu terkait predikat *kota terkotor* di Jawa Timur yang diterima oleh Gresik pada tahun tersebut (*Surabaya Post*, 16 Maret 1992).

Sementara itu, PT Semen Gresik dan Petrokimia Gresik merupakan model awal pelaksanaan penghijauan di lingkungan pabrik. Upaya penghijauan yang dilakukan kedua industri tersebut tidak hanya di kawasan pabrik. Lingkungan pemukiman disekitarnya juga dihimbau untuk melaksanakan penghijauan. Oleh karena itu, lingkungan industri tersebut terlihat asri dan rindang.

Kedua, bedhol desa Pojok Pesisir dan Tepen. *Bedhol desa* merupakan langkah terakhir untuk mengatasi polusi. Desa Pojok Pesisir dan Tepen menjadi sasaran pelaksanaan *bedhol desa* karena tingkat pencemarannya telah kritis. Investor pelaksanaan kedua *bedhol desa* ini adalah PT Petrokimia Gresik (*Surabaya Post*, 11 Januari 1992). Namun, mekanisme pemindahan ditangani oleh Pemda Gresik.

Bedhol desa pertama kali dilakukan terhadap masyarakat Pojok Pesisir karena terkepung pabrik TSP. Rencana pelaksanaan *bedhol desa* yang muncul sejak tahun 1979 tersebut terealisasi tahun 1985. Proses *bedhol desa* tersebut melibatkan tokoh NU untuk meyakinkan warga agar bersedia dipindahkan (Wawancara Fatkhur Rokhman, 2016). Setelah direlokasi ke Gulomantung Kebomas warga mendapatkan tanah lebih luas dari lahan desa sebelumnya dan berbagai fasilitas umum yang sudah ada ataupun belum di Desa Pojok Pesisir (PT

Petrokimia Gresik, t.t: 15). Meskipun demikian, pelaksanaan *bedhol desa* ini dinilai merugikan warga. Uang ganti rugi yang diterima warga dibawah harga pasaran. Oleh karena itu, sebagian besar warga kesulitan biaya dalam membangun rumah. Padahal menurut pihak perusahaan telah diberikan uang ganti rugi sebesar 1,4 miliar. Atas kondisi demikian, pada pelaksanaan *bedhol desa* ini ada indikasi ketidakjujuran dari tim pemindahan. (*Surabaya Post*, 18 Desember 1989).

Bedhol desa kedua dilakukan terhadap warga Desa Tepen tahun 1993 ke Desa Sukomulyo Manyar. Pelaksanaan *bedhol desa* ini lebih menguntungkan masyarakat. Hal ini disebabkan uang ganti rugi yang diterima masyarakat lebih tinggi dibanding harga tanah ditempat yang baru. Disamping itu, warga juga langsung mendapatkan sertifikat resmi (Wawancara Mulyadi, 2015).

Pelaksanaan *Bedhol desa* tersebut tidak mengatasi masalah polusi. Setelah menempati lokasi baru warga merasakan polusi dari industri yang berbeda. Disamping itu, setelah melakukan *bedhol desa* baik warga Pojok Pesisir ataupun Tepen membutuhkan waktu yang relatif lama untuk beradaptasi di lingkungan baru. Warga yang kesulitan melaut juga mengalami kekacauan ekonomi pasca dipindahkan.

Ketiga, pembersihan limbah industri di Kali Surabaya. Sebagai bahan baku air minum bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya Kali Surabaya harus bersih dari polusi. Mengatasi hal tersebut, Pemda Jatim melakukan berbagai kebijakan untuk membersihkan limbah industri di sungai tersebut mulai jagirisasi hingga prokasi.

Jagirisasi merupakan kebijakan bagi industri-industri yang ditengarai penyumbang besar dalam pencemaran

Kali Surabaya agar membuang limbah ke *down stream*-nya Jagir. Dua industri di Driyorejo mengikuti program tersebut yakni PT Surabaya Wire dan PT Miwon. Kebijakan tersebut berlaku hingga 1981 selama industri membangun *water treatment* sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 43 tahun 1978 (APJT, A. 58, No. 49/2). Namun, hingga batas akhir yang ditentukan *water treatment* yang dibangun belum memadai. Pelaksanaan program tersebut membuat kualitas air di kanal Jagir sangat buruk (APJT, 58, No. 49/2).

Pada tahun 1980-an pengawasan terhadap Kali Surabaya meningkat. Ketika itu keterlibatan kalangan kampus mulai terlihat dalam mengatasi pencemaran Kali Surabaya. Beberapa perguruan tinggi terutama Unair dan ITS bekerja sama dengan pemerintah ataupun secara mandiri melakukan penelitian terhadap Kali Surabaya maupun industri disepanjang sungai tersebut. Pada saat itu pengawasan atas limbah industri di Kali Surabaya juga meningkat dari kalangan pemerintah terutama masa Wagub Trimarjono (*Jawa Pos*, 12 Agustus 1994). Pada tahun 1987 untuk pertama kalinya dilakukan penggelontoran Kali Surabaya (*Jawa Post*, 25 Pebruari 1993). Namun, penggelontoran hanya membersihkan sungai sementara waktu atau memindahkan beban pencemaran ke tempat lainnya (*Suara Indonesia*, 4 Juni 1994).

Perhatian serius terhadap Kali Surabaya meningkat dengan pelaksanaan prokasih tahun 1990-an. (*Karya Darma*, 24 Juni 1995). Sebagai salah satu sungai yang diikutkan dalam prokasih maka pengawasan terhadap industri dan Kali Surabaya rutin dilakukan oleh kalangan pemerintah ataupun non pemerintah. Disamping itu, beberapa industri juga

dilibatkan dalam prokasih, antara lain: PT Surya Kertas, PT Surabaya Mekabox, PT Miwon, PT WIM (pabrik sepeda), PT Sosro Kencono, dan sebagainya (*Surabaya Post*, 24 Maret 1994). Pada masa pelaksanaan prokasih ini sikap tegas pemerintah dalam menindak pencemar ditunjukkan dengan membawa kasus pencemaran PT Surabaya Mekabox ke ranah hukum tahun 1994 (*Surabaya Post*, 10 Mei 1994).

Keempat, daur ulang limbah industri. Beberapa industri di Kabupaten Gresik melakukan daur ulang limbah, seperti: PT Miwon, PT Petrokimia Gresik, PT Nusa Prima Pratama, PT Emdeki, dan sebagainya. Meskipun demikian, upaya daur limbah industri tersebut tidak dapat memutus pencemaran yang terjadi. Bahkan diantaranya justru menambah beban pencemar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT Nusantara Plywood. Industri yang menghasilkan 139.630 meter kubik limbah kayu tersebut memanfaatkan limbahnya dengan membuka industri baru yakni PT Nusa Prima Pratama. Pabrik tersebut menghasilkan limbah padat 30 m³/hari dan partikel debu (APJT, No. 64/8/BPM). Oleh karena itu, pembangunan industri tersebut justru menambah semburan debu pada masyarakat sekitar industri kayu.

Kelima, kerja sama internasional dengan Jepang. Prospek kerja sama yang terjalin antara Gresik dan Jepang hanya sebatas transfer pengetahuan. Wujud nyata atas kerja sama tersebut belum terlihat. Rencana untuk membentuk *sister city* antara Gresik dan Yokaichi sekitar tahun 1993 tidak terwujud (*Surabaya Post*, 3 Agustus 1993). Dalam hal ini, kendala utamanya adalah biaya. Atas kondisi demikian, perbedaan utama antara Gresik dan Jepang belum diatasi. Industri di Jepang jujur dalam pengelolaan

limbahnya berbanding terbalik dengan kondisi industri di Gresik. Hal ini dapat diketahui melalui inspeksi mendadak oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Simpulan

Industrialisasi memiliki peran besar dalam mencemari lingkungan di Kabupaten Gresik. Kehadiran industri terutama berskala besar ditengarai menjadi penyumbang besar dalam pencemaran di wilayah Gresik. Dalam hal ini, beberapa industri yang menjadi sorotan atas polusinya adalah industri semen, kimia, kayu, kertas, bumbu masak, dan sebagainya. Beragam bentuk pencemaran terjadi yakni pencemaran udara, air, dan tanah. Hal ini didukung dengan kondisi sebagian besar industri yang belum memiliki alat anti polusi atau pengolah limbah memadai. Kondisi demikian terjadi sejak tahun 1970-an.

Pencemaran yang terjadi memunculkan dua bentuk respon dari masyarakat sekitar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sikap industri terhadap masyarakat. Industri-industri berskala besar yang memberikan perhatian lebih kepada masyarakat menerima respon sebatas diplomasi atau pengaduan secara damai. Sedangkan, industri yang menutup diri dari masyarakat seringkali menjadi sasaran aksi unjuk rasa.

Sementara itu, pencemaran lingkungan menimbulkan dampak yang kompleks bagi kehidupan masyarakat. Aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan psikologis masyarakat terganggu atas pencemaran yang terjadi. Dalam hal ini, pihak pemerintah dan perusahaan memiliki peran penting untuk melakukan upaya penanggulangan. Namun, upaya penanggulangan yang dilakukan seringkali tidak efektif. Hal ini disebabkan koordinasi yang tidak baik antara pemerintah dan perusahaan. Oleh karena itu, problem lingkungan masih terus

terjadi di Gresik.

Daftar Pustaka

Arsip Kota Surabaya, *Surat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Laporan Pencemaran Kali Surabaya*, tanggal 3 Juli 1975, Nomor 6500/30/75.

Arsip Propinsi Jawa Timur, Balai Penelitian Kimia Surabaya dan Team Penelitian dan Monitoring air Buangan Industri, *Laporan Monitoring Air Kanal Jagir dan Kalimas*, A. 58, No. 49/2/Balai Riset dan Standarisasi Industri 1980.

Arsip Propinsi Jawa Timur. *Daftar Proyek PMDN/PMA Jawa Timur yang Diduga Menimbulkan Pencemaran Terhadap Lingkungan s/d Juni 1988*. Nomor. 64/8/BPM.

Buletin Berita Industri, No. 4 th. XV 1981, No. 12 th XVI 1983/1984.

Jawa Pos, 2 Februari 1989.

Kantor Statistik Kabupaten Gresik dan Bappeda Kabupaten Daerah Tk. II Gresik. *Gresik dalam Angka 1985*. Gresik: Kantor Statistik Kabupaten Gresik dan Bappeda Kabupaten Daerah Tk. II Gresik.

Karya Dharma, 24 Juni 1995.

Loemaksono. 2012. *Yang Tercecer dan Terlupakan di Kota Gresik (Kumpulan Kisah Bersejarah)*, t.t: n.n.

Neraca, 13 Agustus 1994.

Press.

PT Petrokimia Gresik. t.t. *Dwi Windu PT Petrokimia Gresik (1972-1988)*. t.t: PT Petrokimia Gresik.

Zainuddin, Oemar. 2010. *Kota Gresik 1896-1916 Sejarah Sosial Budaya dan Ekonomi*. Jakarta: Ruas.

Purnawan Basundoro. 2001. "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat", *Jurnal Humaniora*, Volume XIII No.2.

Siahaan, Bisuk. 1996. *Industrialisasi di Indonesia Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Suara Indonesia, 4 Juni 1994.

Surabaya Post, 22 September 1976, 31 Januari 1979, 25 Juli 1981, 27 Pebruari 1982, 30 Januari 1984, 30 Juli 1984, 18 November 1986, 13 Desember 1986, 21 April 1987, 8 Juli 1987, 16 Juli 1987, 16 September 1987, 17 April 1988, 25 Mei 1989, 18 Desember 1989, 6 Oktober 1990, 11 Januari 1992, 16 Maret 1992, 9 Mei 1992, 19 Januari 1993, 3 Agustus 1993, 24 Maret 1994, 10 Mei 1994, 21 September 1994.

Surya, 29 April 1993, 7 Pebruari 1994, 15 Agustus 1994.

Tim Penyusun. 1976. *Buku Petunjuk Metropolitan Surabaya dan Jawa Timur*. Surabaya: Penerangan Daerah Militer VIII/Brawijaya.

Wuryan, Hadi. 1997. *Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Semarang: IKIP Semarang

Data Informan

1. Nama : Adiana Setiawati
Usia : 51 tahun
Status : Mantan ketua bagian lingkungan hidup Kabupaten Gresik
Alamat : Jl. Belitung 3/No. 8 Gresik Kota Baru
2. Nama : Mulyadi
Usia : 55 tahun
Status : Panitia *bedhol desa* Tepen
Alamat : Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
3. Nama : Nur Fitri
Usia : 47 tahun
Status : Mantan warga Pojok Pesisir
Alamat : Desa Sukerejo RT IV, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
4. Nama : Oemar Zainuddin
Usia : 74 tahun
Status : Warga Kampung Kemasan Gresik
Alamat : Kampung Kemasan No. 10 Gresik.
5. Nama : Parmanto
Usia : 63 tahun
Status : Mantan ketua panitia 7 Desa Indro
Alamat : Kelurahan Indro gang 2, Kebomas, Gresik.
6. Nama : Pauwan
Usia : 62 tahun
Status : Mantan ketua RT Desa Singasari
Alamat : Kelurahan Singasari RT 04/RW 10, Kebomas, Gresik.
7. Nama : Samirin (nama samaran)
Usia : 56 tahun
Status : Aparat Desa Bambe
Alamat : Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
8. Nama : Slamet Uman

Usia : 57 tahun
Status : Aparat Kelurahan Roomo
Alamat : Kelurahan Roomo, Kec.
Manyar, Kab. Gresik.

9. Nama : Sun'an
Usia : 64 tahun
Status : Mantan aparat Desa
Pojok
Alamat : Desa Sukorejo RT. 3, Kec.
Kebomas, Kab. Gresik.
10. Nama : Fatkhur Rohman
Usia : 40 tahun
Status : Kepala Desa Sukorejo
Alamat : Desa Sukorejo RT.3,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik.